

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah adalah bagian integral dari upaya pendidikan yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai pelayanan pengembangan potensi peserta didik seoptimal mungkin. Layanan bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling (BK) sesuai dengan tugas pokok dalam upaya membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional, dan khususnya membantu peserta didik mencapai perkembangan diri yang optimal, mandiri, sukses, dan sejahtera. Tujuan tersebut diperlukan untuk mencapai kolaborasi dan sinergisitas kerja antara guru BK, guru mata pelajaran, kepala sekolah, staff administrasi, orang tua, dan pihak lain yang dapat membantu kelancaran proses pelaksanaan dan pengembangan peserta didik secara optimal dalam bidang sosial, belajar, pribadi, dan karier.

Menurut Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 mengenai Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang menyatakan bahwa pengembangan kompetensi peserta didik memerlukan sistem layanan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran bidang studi dan manajemen, melainkan layanan bantuan khusus yang bersifat psiko-edukatif melalui layanan bimbingan dan konseling karena peserta didik masing-masing

memiliki perbedaan dalam tingkat kecerdasan, bakat, minat, kepribadian, kondisi fisik dan latar belakang keluarga serta pengalaman belajar yang menggambarkan adanya perbedaan masalah yang dihadapi oleh masing-masing peserta didik. Maka dari itu, guru BK diharapkan memiliki kualitas dalam pelayanan bimbingan dan konseling (Kemendikbud, 2014).

Guna menjamin dan menjaga kualitas pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi konselor dan kompetensi konselor. Standar kualifikasi konselor dan kompetensi tersebut dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan agar pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dapat berjalan dengan efektif dan efisien, selain itu juga sebagai jaminan dapat dikuasanya tingkat kompetensi guru BK di sekolah (Permendiknas, 2008).

Natawidjaja memaparkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling terdapat beberapa jenis layanan, salah satunya yaitu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan upaya memberikan bantuan kepada individu dalam bentuk suasana kelompok yang bersifat penyembuhan serta diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan pertumbuhan setiap individu (Wibowo, 2005).

Layanan konseling kelompok sangat penting untuk dilakukan di sekolah oleh guru BK karena konseli memiliki kebutuhan dan atau permasalahan yang terkadang membutuhkan suasana kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan atau untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Pelaksanaan konseling

kelompok dipandang efektif untuk membantu siswa dalam menyelesaikan banyak isu permasalahan. Keunggulan konseling kelompok adalah membantu pengembangan aspek sosial konseli, membantu para siswa yang mengalami kesulitan, mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya dan kemampuan mengadakan interaksi sosial dengan anggota kelompok yang lain (Depdiknas, 2008).

Kesediaan untuk mendengarkan pendapat orang lain dan kemampuan menyampaikan pendapat, empati, *cohesiveness* yang merupakan dimensi positif bagi anggota kelompok. Oleh karena itu, proses kelompok berperan sebagai media untuk mengembangkan kepribadian bagi anggota kelompok tertentu. Konseling kelompok bersifat terapiutik, kuratif, responsif dan rahasia. Konseling kelompok juga dapat diberikan sebagai bantuan untuk mendukung konseli menghadapi kondisi-kondisi krisis. Konseling kelompok lebih banyak menjangkau konseli dalam proses bantuannya, kegiatan ini lebih efektif jika dibandingkan dengan kegiatan konseling individu (Winkel, 2005). Oleh sebab itu, guru BK dituntut untuk dapat memberikan bantuan kepada peserta didik/konseli dan mampu melaksanakan layanan konseling kelompok di sekolah.

Mengingat pentingnya konseling kelompok, maka guru BK dituntut menguasai landasan teoritik dan praktik konseling kelompok secara memadai. Konseling kelompok juga bukan hanya sebagai sebuah perspektif tetapi juga sebagai suatu teknik dan strategi dalam konseling kelompok. Pentingnya konseling kelompok sejalan dengan pendapat Corey & Corey yang

mengemukakan mengenai pemahaman terhadap konseling kelompok harus dilakukan dalam pendekatan integratif dan eklektif. Integrasi secara teoretis berusaha mengkolaborasi dengan perspektif lain untuk memperkaya kajian sehingga konseling tidak berkembang secara terpisah dan mandiri tetapi terintegrasi dengan prinsip-prinsip keilmuan yang lain (Corey & Corey, 2005). Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Prayitno yang menjelaskan bahwa kajian konseling kelompok merupakan pendekatan intergratif yang memadukan konsep dinamika kelompok, multikulturalisme dan kompetensi personal (Prayitno, 2003). Meski pentingnya konseling kelompok telah diakui banyak pihak, namun kebanyakan tulisan hanya membahas mengenai konseling individual, sementara konseling kelompok kurang banyak menjadi bahan kajian dalam forum-forum konseling (Schmidt, 2003).

Permasalahan yang meliputi konseling kelompok tidak hanya ditaraf kajian ilmiah namun juga pada praktik di lapangan. Salah satu masalah di lapangan terkait konseling kelompok diungkapkan oleh Eko Susanto (2012) yang menyatakan bahwa pada kenyataan dilapangan masih ditemukan guru BK di sekolah yang mengalami kendala dalam penyelenggaraan kegiatan konseling kelompok. Kendala yang dialami secara umum dibagi menjadi dua yaitu (1) kendala internal; terkait dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, kepercayaan diri dan kemampuan guru BK, (2) kendala eksternal; baik yang sistemik terkait penerimaan sekolah terhadap layanan bimbingan dan konseling, penjadwalan, waktu; atau yang bersifat struktural bagi guru BK yang memiliki

posisi jabatan tertentu. Meskipun tidak semua guru BK di sekolah terkendala dengan hal tersebut diatas, namun secara umum ini banyak menjadi dilema yang dialami oleh guru BK di sekolah (Susanto, 2012).

Indikasi rendahnya kompetensi guru BK/konselor di DKI Jakarta ditunjukkan dengan uji kompetensi guru BK (konselor) yang mencakup empat rumpun kompetensi, yaitu: (1) penguasaan terhadap konsep/materi, kurikulum, metode dan evaluasi bimbingan; (2) kemampuan dalam menyelenggarakan dan mengelola pelaksanaan bantuan atau bimbingan kepada peserta didik, (3) pengembangan potensi diri; (4) sikap dan kepribadian. Hasil uji kompetensi guru BK/konselor di wilayah DKI Jakarta, dari 385 responden, kepemilikan keseluruhan rumpun kompetensinya: 2% sangat baik (A), 9% baik (B), 47% sedang (C), 38% kurang (D), dan 4% sangat kurang (E). Hal tersebut dapat dilihat bahwa kompetensi yang dimiliki oleh guru BK/konselor berada pada kategori rendah. Maka dari itu, perlu studi khusus guna mengembangkan perangkat instrumen penyelenggaraan pembinaan kompetensi guru BK/konselor, sebagai tindak lanjut pasca uji kompetensi yang telah dilakukan untuk diterapkan dalam upaya pengembangan kompetensi guru BK/konselor lebih lanjut (Harjati, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Novitasari (2016) menunjukkan masih banyak di sekolah yang mengangkat guru BK bukan berlatar belakang pendidikan S1 BK, alasan yang sering diungkapkan adalah bahwa sekolah tersebut kekurangan guru, keberadaan guru BK di lapangan masih minim sehingga dalam mengangkat guru BK pihak sekolah terutama kepala sekolah tidak

mempertimbangkan guru BK berdasarkan latar belakang pendidikannya. Maka dari itu, masih banyak guru BK yang belum mengetahui perannya dan bekerja sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Salah satu layanan bimbingan dan konseling yaitu layanan konseling kelompok, sehingga dalam pelaksanaannya di sekolah tidak optimal dan efektif (Novitasari, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2014) memperlihatkan masalah internal guru BK yang mungkin mempengaruhi praktik pemberian layanan konseling kelompok di sekolah. Melalui wawancara dan observasi dengan beberapa guru BK di DKI Jakarta terutama pada guru BK yang bukan berlatar belakang S1 BK, peneliti menemukan bahwa guru BK kurang memiliki kesadaran untuk mengikuti kegiatan lokakarya, workshop dan seminar yang terkait layanan konseling karena kurang terfasilitasi oleh pihak sekolah. Selain itu, guru BK kurang termotivasi mengikuti kegiatan-kegiatan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK), dan guru BK tidak termotivasi untuk membaca buku-buku yang bisa menunjang perkembangan pengetahuannya. Guru BK yang kurang termotivasi mengembangkan profesionalitasnya, akan berdampak negatif pada tingkat profesional dan perkembangan diri guru BK itu sendiri. Dampak negatif yang terjadi adalah guru BK ketinggalan informasi-informasi baru bidang bimbingan dan konseling terutama dalam layanan konseling kelompok. Selain itu, guru BK tidak memiliki hubungan yang baik dengan rekan-rekan guru BK lainnya untuk berbagi informasi dan berdiskusi terkait informasi-informasi baru di dunia

bimbingan dan konseling. Dampak-dampak negatif tersebut tentunya akan berpengaruh pula pada keberhasilan dan keefektifan guru BK dalam memberikan layanan konseling kelompok kepada peserta didik/konseli (Wahyu, 2014).

Upaya untuk memperjelas realitas praktik konseling kelompok dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara pada enam guru BK di SMPN 199, SMPN 168, dan SMPN 193 Jakarta Timur. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa konseling kelompok belum diterapkan secara optimal oleh guru BK di sekolah. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh enam responden bahwa layanan konseling kelompok tidak pernah dilakukan di sekolah. Keenam responden mengatakan bahwa mereka belum mengetahui prosedur pelaksanaan konseling kelompok yang sebaik-baiknya, seperti pendekatan yang cocok dengan permasalahan konseli serta peran guru BK dalam memimpin kelompok, bahkan guru BK masih sepenuhnya memberikan nasihat atau solusi kepada konseli. Alasan pertama adalah guru BK tidak berasal dari latar belakang bimbingan dan konseling sehingga tidak memahami hakikat konseling kelompok dengan benar dan alasan kedua adalah pemberian nasihat dirasa guru BK lebih mudah daripada melakukan konseling kelompok dengan pendekatan-pendekatan konseling kelompok. Konseling kelompok pada hakekatnya bukanlah hanya pemberian nasihat semata, akan tetapi, banyak keterampilan lain yang bisa digunakan dalam pelaksanaan proses konseling kelompok. Oleh sebab itu, berdasarkan pernyataan responden di atas diindikasikan bahwa enam responden tersebut belum memberikan layanan konseling kelompok dengan optimal karena

kurangnya pengetahuan tentang konseling kelompok (*Interview pra research*, 18 Juli 2017).

Sementara, peneliti melakukan wawancara terbatas pada salah satu siswa di SMP Negeri 199 Jakarta Timur yang pernah melakukan proses konseling kelompok, dapat diketahui bahwa pada saat proses konseling kelompok guru BK lebih banyak berbicara dan memberikan nasihat, dengan kata lain guru bimbingan dan konseling terlihat lebih aktif berbicara sedangkan siswa lebih banyak cenderung pasif dan hanya bertanya saat ada yang tidak mengerti (*Interview pra research*, 20 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam layanan konseling kelompok masih banyak guru BK yang hanya memberikan nasihat daripada menerapkan pendekatan-pendekatan konseling kelompok. Pemberian nasihat lebih cenderung pada *counselor-centered* bukan *client-centered* yang bisa berpotensi menghancurkan hubungan konseling (Neukrug, 2012). Jika mengacu pada teori *person-centered* yang dicetuskan oleh Rogers, manusia pada dasarnya dapat dipercaya, memiliki akal, mampu memahami diri dan pengarahan diri sendiri, mampu membuat perubahan yang konstruktif, dan mampu untuk hidup efektif dan produktif (Corey & Corey, 2009). Jika merujuk pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa proses konseling kelompok bukanlah sebuah proses pemberian nasihat, akan tetapi bagaimana guru BK memanfaatkan potensi yang dimiliki konseli untuk mengarahkan dirinya dalam mencapai kehidupan yang efektif dan produktif.

Indikasi jika sampai tetap terjadi fenomena lulusan sarjana S1 non BK menjadi guru BK akan menimbulkan tindakan amoral generasi penerus bangsa ini. Undang-Undang yang mengatur tentang kualifikasi dan kompetensi konselor tidak sejalan dengan realita yang terjadi. Untuk langkah yang mungkin bisa dilakukan adalah pemerintah harus menyusun rencana strategis yang berpihak pada guru BK, pemerintah juga harus bertindak tegas, pemerintah harus turun langsung ke lapangan melihat realitanya seperti apa kualifikasi akademik guru BK di setiap sekolah, bagaimana kompetensi akademik guru BK, berapa guru BK yang harus dibutuhkan untuk setiap daerah dengan diseimbangkan jumlah siswa di masing-masing sekolah. Kemudian kepala sekolah harus mendukung setiap program yang diusulkan oleh guru BK. Guru BK, kepala sekolah, dan guru mata pelajaran saling mendukung guna mewujudkan tujuan bersama. Kepala sekolah harus mendukung setiap kegiatan yang menjalin hubungan dengan guru BK yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi guru BK seperti seminar, lokakarya dan MGBK, serta yang terpenting adalah guru BK itu sendiri benar-benar memiliki latarbelakang pendidikan S1 BK dan harus profesional, luwes, berkompeten dan mumpuni di bidang Bimbingan dan Konseling.

Penelitian-penelitian di atas telah memaparkan beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan di dunia pendidikan. Di antara faktor-faktor tersebut peneliti memerhatikan faktor kurangnya pengetahuan guru BK berlatar belakang S1 Non BK mengenai konseling kelompok. Faktor ini dianggap penting karena guru BK harus memiliki pengetahuan dasar mengenai konseling kelompok,

sebelum mengembangkan keterampilan untuk menghadapi konseli dalam pelaksanaan konseling kelompok. Hal ini dijelaskan oleh *Professional Standards for The Training of Group Workers* yang menjelaskan kompetensi guru BK/konselor dalam konseling kelompok, terdiri dari pengetahuan, *personal awareness*, sensitivitas, dan keterampilan yang membantu keberhasilan bekerja didalam kelompok yang beragam. Teori tersebut relevan untuk mengkaji kompetensi guru BK karena terdapat kesamaan kualifikasi antara konselor dan guru BK, yang menyatakan bahwa seorang guru BK/konselor harus memiliki beberapa kompetensi, salah satunya adalah pengetahuan. Jika terdapat ketidakefektifan dalam praktik konseling kelompok di sekolah terdapat juga kemungkinan bahwa guru BK belum menguasai pengetahuan konseling kelompok secara optimal (Association for Specialists in Group Work, 1998). Studi terbaru dari Tohirin juga menyatakan dalam artikelnya bahwa “konselor yang terampil adalah yang mengetahui dan memahami sejumlah pengetahuan atau teori-teori tertentu dan mampu mengaplikasikannya dalam proses konseling kelompok” (Tohirin, 2007). Hal ini berlaku juga untuk konselor sekolah atau yang disebut sebagai guru bimbingan dan konseling.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengetahuan konseling kelompok pada guru BK berlatar belakang S1 Non BK yang bertujuan agar mendapatkan gambaran pengetahuan konseling kelompok pada sebagian populasi guru BK berlatar belakang S1 Non BK di SMP Negeri Jakarta Timur. Sebagian besar guru BK memiliki latar belakang

pendidikan dari S1 Psikologi, S1 Bahasa Indonesia, S1 PKN, S1 Tata Niaga, S1 PLS, S1 Filsafat, S1 Pendidikan Agama, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Manajemen Pendidikan, dan S1 Administrasi Pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penelaahan lebih lanjut. Tetapi, sampai saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji pengetahuan guru BK berlatar belakang S1 Non BK dalam konseling kelompok. Sementara data hasil penelaahan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan pengetahuan dalam berbagai konteks seperti pendekatan, strategi, maupun konten kurikulum untuk memfasilitasi pengembangan pengetahuan guru BK berlatar belakang S1 Non BK dalam konseling kelompok dan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan sehingga guru BK di sekolah sebaiknya memiliki latar belakang pendidikan S1 BK. Selain itu, guru BK harus diberikan pelatihan-pelatihan terkait layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh lokakarya dan MGBK agar guru BK mendapatkan pelatihan mengenai kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh guru BK terutama pada pengetahuan dalam layanan konseling kelompok.

Oleh sebab-sebab di atas perlu dilakukan pengambilan data menggunakan sampel yang lebih besar untuk mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan guru BK berlatar belakang S1 Non BK mengenai konseling kelompok. Jadi, peneliti memfokuskan untuk mengangkat permasalahan dengan menuangkannya dalam bentuk skripsi sebagai sumbangsih pemikiran tertulis

dengan judul “Pengetahuan konseling kelompok pada guru bimbingan dan konseling S1 Non BK di SMP Negeri Jakarta Timur.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa identifikasi masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Apakah guru bimbingan dan konseling memahami peran dan tugasnya dalam melaksanakan layanan konseling kelompok?
2. Bagaimana gambaran pengetahuan konseling kelompok pada guru bimbingan dan konseling S1 Non BK di SMP Negeri Jakarta Timur?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang dan identifikasi masalah agar pembahasan penelitian ini terarah pada tujuan penelitiannya, maka dari itu, penelitian ini dibatasi kepada pengetahuan konseling kelompok guru bimbingan dan konseling S1 Non BK di SMP Negeri Jakarta Timur. Hal ini disebabkan, karena pengetahuan tentang konseling kelompok merupakan salah satu dasar guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan konseling kelompok yang profesional sebelum mengarah pada keterampilan atau pengalaman praktik.

D. Perumusan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

“Bagaimana pengetahuan konseling kelompok pada guru bimbingan dan konseling S1 Non BK di SMP Negeri Jakarta Timur?”

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari hasil penelitian tersebut yang diharapkan adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

- a. Untuk pengembangan wawasan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan mengenai konseling kelompok, khususnya bagi Program Studi Bimbingan dan Konseling.
- b. Untuk menambah referensi dan sumber informasi mengenai pengetahuan tentang konseling kelompok agar lebih dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis:

- a. Dapat memberikan masukan mengenai pentingnya memiliki pengetahuan dalam konseling kelompok bagi seorang guru bimbingan dan konseling, serta dapat lebih memahami dan mendalami pengetahuan seperti teori-teori tentang konseling kelompok.
- b. Dapat menjadi masukan bagi para praktisi pendidikan serta institusi pendidikan yang terkait untuk mengetahui kompetensi yang harus dimiliki guru bimbingan dan konseling baik lulusan S1 BK maupun lulusan S1 Non BK dalam memberikan layanan konseling kelompok di sekolah.

- c. Dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan pengetahuan dalam berbagai konteks seperti pendekatan, strategi, maupun konten kurikulum untuk memfasilitasi pengembangan pengetahuan guru bimbingan dan konseling dalam konseling kelompok.
- d. Bagi kepala sekolah, untuk meningkatkan program kegiatan bimbingan dan konseling ke arah yang lebih baik, serta mendukung guru bimbingan dan konseling untuk mengikuti kegiatan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) atau lokakarya.
- e. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan data penelitian ini sebagai informasi awal dan referensi untuk melanjutkan penelitian serupa, serta dapat melakukan penyempurnaan pada hasil penelitian ini.